

Penutupan Program Studi Ilmu Sosial dan Humaniora sebagai Kekeliruan Kategoris Pendidikan Tinggi

Riko

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI

INFO ARTICLES

Key Words:

categorical mistake; ethico-constitutional mandate; critical reason; social sciences and humanities; premature deindustrialization



This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract: This article presents a philosophical analysis of the closure of Social Sciences and Humanities (SSH) programs, arguing that it reflects a categorical mistake in higher education policy driven by the paradigm of “industrial relevance.” It examines whether this orientation is conceptually, constitutionally, and structurally sound as a basis for organizing academic disciplines in universities. The article argues that excluding SSH is a categorical mistake rooted in reducing higher education to a producer of human capital and in misreading national employment problems. Using philosophical-conceptual reasoning, historical analysis, and political-economic critique, it shows that the low absorption of educated labor is caused by premature deindustrialization and stagnation in the manufacturing sector, not by the irrelevance of SSH. SSH serves important normative and emancipatory roles by cultivating critical reason and helping resist digital neocolonialism. The article concludes by emphasizing the need for integrated collaboration between SSH and STEM.

Abstrak: Artikel ini menyajikan analisis filosofis mengenai penutupan program Ilmu Sosial dan Humaniora (SSH), dengan berargumen bahwa kebijakan tersebut merupakan sebuah kekeliruan kategoris yang lahir dari argumen “relevansi industri.” Kajian ini menelaah apakah argumen tersebut memiliki dasar yang kokoh secara konseptual, konstitusional, dan struktural sebagai prinsip pengorganisasian disiplin akademik di perguruan tinggi. Artikel ini berpendapat bahwa pengecualian terhadap SSH merupakan kekeliruan kategoris yang berakar pada reduksi pendidikan tinggi menjadi sekadar produsen modal manusia serta pada pembacaan yang keliru terhadap persoalan ketenagakerjaan nasional. Melalui penalaran filosofis-konseptual, analisis historis, dan kritik politik-ekonomi, artikel ini menunjukkan bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja terdidik disebabkan oleh deindustrialisasi dini dan stagnasi sektor manufaktur, bukan oleh ketidakrelevanan SSH. SSH justru menjalankan fungsi normatif dan emansipatoris yang penting melalui pengembangan nalar kritis dan perlawanan terhadap bentuk-bentuk neokolonialisme digital. Artikel ini menutup dengan menegaskan urgensi kolaborasi terpadu antara SSH dan STEM.

Correspondence Address: Jl. Raya Tengah N0. 80 Kel. Gedong, Kec. Ps. Rebo - Jakarta Timur 13760 Telp : (021) 87781300, (021) 87797409; e-mail: rikobidik@gmail.com.

How to Cite (APA 6th Style): Riko. (2026). Penutupan Program Studi Ilmu Sosial dan Humaniora sebagai Kekeliruan Kategoris Pendidikan Tinggi. *Prosiding Diskusi Panel Nasional Pendidikan Matematika*, 391-398.

Copyright: Riko, (2026)

PENDAHULUAN

Mandat "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki kedalaman filosofis yang melampaui sekadar pelatihan keterampilan vokasional (*technical skills*). Konstitusi menetapkan pendidikan sebagai upaya sadar untuk membangun karakter, harkat, dan kedaulatan manusia Indonesia (Lontoh & Chia, 2022; Mahfud MD & Heryansyah, 2025). Dalam kerangka ini, pemprioritasan disiplin STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) secara eksklusif dengan meminggirkan SSH berisiko menghasilkan lulusan yang cocok secara algoritmik, tetapi buta terhadap struktur sosial politik yang menindas mereka. Padahal, rekam jejak dekolonisasi Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran kritis untuk merdeka lahir dari literasi humaniora yang mampu membongkar hierarki feodal dan penjajahan (Pratama, 2015; Riko, 2024).

Berangkat dari landasan tersebut, artikel ini mengajukan tesis bahwa kebijakan penutupan program studi SSH demi memenuhi tuntutan relevansi industri merupakan sebuah kekeliruan kategoris (*category mistake*) yang secara fundamental mengkhianati mandat konstitusi untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa". Kekeliruan ini berakar pada reduksi ontologis terhadap institusi pendidikan tinggi yang dipandang semata-mata sebagai instrumen utilitas ekonomi atau pabrik pencetak tenaga kerja teknis, bukan sebagai ruang pengembangan peradaban (Vicky, 2026). Selain itu, narasi tersebut gagal mengidentifikasi bahwa krisis penyerapan tenaga kerja di Indonesia bukanlah konsekuensi dari ketidakrelevanan kurikulum akademik, melainkan gejala langsung dari fenomena deindustrialisasi dini (*premature deindustrialization*) yang bersifat struktural dan makroekonomi (Çakır & Aydemir, 2022).

Pada artikel ini, istilah "kekeliruan kategoris" merujuk pada kesalahan logika esensial dalam menempatkan konsep pendidikan tinggi ke dalam kategori fungsional yang tidak tepat, yakni mengukur keberhasilan pencarian kebenaran intelektual murni dengan metrik efisiensi pasar modal yang temporal. Adapun "deindustrialisasi dini" didefinisikan sebagai kondisi patologis ekonomi ketika sektor manufaktur mengalami penyusutan kontribusi terhadap PDB dan lapangan kerja sebelum sebuah negara mencapai tingkat kematangan pendapatan per kapita yang memadai (Bogliaccini, 2013). Wacana penutupan program studi yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknasristek) pada April 2026 (Sukoco, 2026), yang berupaya menyelaraskan pendidikan hanya pada delapan bidang strategis industri, mencerminkan puncak hegemoni neoliberalisme yang mengalienasi nilai substansial ilmu sosial dan keagamaan (Irfani, 2026; Robi, 2026).

Atas dasar itu, artikel ini membedah secara sistematis mengapa argumen "relevansi industri" merupakan mitos yang berbahaya jika dijadikan landasan tunggal kebijakan. Bagian pertama mengurai fondasi etis-konstitusional pendidikan nasional dan peran historis SSH yang tidak dapat direduksi menjadi komoditas pasar. Selanjutnya, analisis menunjukkan bukti empiris bahwa rendahnya serapan tenaga kerja sarjana merupakan residu dari kegagalan industrialisasi nasional dan sindrom *Dutch Disease*, bukan akibat kelebihan pasokan lulusan filsafat atau sastra (Andrade & Duarte, 2017; Çakır & Aydemir, 2022). Melalui sintesis ini, diharapkan muncul reorientasi kesadaran publik yang memandang SSH bukan sebagai beban fiskal, melainkan sebagai perangkat imunologi sosial untuk menjaga iklim demokrasi di tengah transformasi digital yang kian impersonal.

MANDAT KONSTITUSI DAN PERAN HISTORIS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Dekonstruksi Feodalisme

Dari dimensi empiris, kebangkitan nasional pada dekade awal abad ke-20 harus didiagnosis sebagai suatu revolusi epistemologis, bukan sekadar bentrokan fisik. Tatkala sistem kolonial Belanda memberlakukan pendidikan teknis administratif kelas bawah, akses sembunyi-sembunyi terhadap literatur filsafat politik Barat mengizinkan kaum pergerakan untuk menelanjangi ilusi keagungan penjajah (Pratama, 2015). Ilmu SSH membuka kesadaran kolektif bahwa penderitaan mereka bukanlah takdir alamiah, melainkan hasil dari konstruksi kekuasaan yang dapat dilawan.

Manifestasi konkret dari dekonstruksi tersebut terlihat pada kapasitas nalar sosiologis dalam mendobrak kebekuan struktur feodal domestik. Selama berabad-abad, masyarakat Nusantara terbelenggu dalam kasta tradisional antara priyayi (elite aristokrat) dan *wong cilik* (rakyat biasa), yaitu suatu sistem yang di dalamnya kekuasaan dipandang sebagai wahyu mistis yang tidak boleh dipertanyakan (Sarsito, 2006). Pendekatan kritis filsafat berhasil melakukan desakralisasi atas hierarki menindas tersebut, sehingga mengubah mentalitas rakyat dari posisi kawula yang pasif menjadi warga negara (*citizen*) yang menuntut hak asasinya.

Berangkat dari kasus spesifik tersebut, penelusuran genealogis kebijakan pendidikan di Nusantara membuktikan bahwa konstitusi ini sejatinya dirumuskan sebagai perlawanan (antitesis) terhadap model pendidikan Etis Belanda yang sengaja didesain untuk menciptakan kelas pekerja *inlander* yang patuh (Pratama, 2015). Wacana penutupan program studi non-industri saat ini secara tragis mereplikasi pola subordinasi masa lampau ketika kerangka kurikulum didikte sepenuhnya oleh kehendak pasar kapital global, daripada sebagai upaya untuk membebaskan rakyat dari keteringgalan struktural (Sarsito, 2006). Fakta empiris ini mengindikasikan bahwa kapasitas kritis untuk mengevaluasi ketidakadilan dan memformulasikan etika publik mustahil ditumbuhkan murni di dalam laboratorium fisika atau kelas pemrograman.

Dari serangkaian fakta sejarah partikular tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan mahkota pencapaian dari dialektika ilmu sosial yang dibimbing oleh komitmen humanis (Japar, 2018). Oleh karena itu, apabila saat ini otoritas pendidikan secara perlahan mematikan program studi SSH demi ambisi teknokratis, negara pada hakikatnya sedang merusak perisai yang dahulu melindunginya dari eksploitasi. Pelemahan nalar kritis ini secara induktif akan memuluskan jalan bagi reinkarnasi praktik subordinasi di kancah persaingan global kontemporer (Riko, 2024).

Visi Intelektual Para Pendiri Bangsa

Melalui generalisasi dari bukti historis di atas, genealogi pendirian Republik Indonesia menegaskan bahwa fondasi kedaulatan bangsa ini diletakkan di atas dialektika intelektual yang berakar pada tradisi SSH. Para penenun peradaban bangsa, seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir, memandu imajinasi publik melalui diskursus sosiologi, ekonomi politik, dan filsafat hukum untuk merakit komunitas politik yang sanggup melampaui batasan etnoreligiusitas. Sebagaimana teridentifikasi dalam kajian Pancasila sebagai *Grundnorm* (norma dasar), otoritas negara bersumber dari konsensus etis yang menjadi perekat kohesi sosial (Samekto & Natalis, 2024). Fenomena ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa keindonesiaan adalah suatu proyek kebudayaan, bukan semata proyek infrastruktur teknis.

Karakter perjuangan para pendiri bangsa secara konsisten menunjukkan upaya sistematis dalam mendekonstruksi pengetahuan hegemonik kolonial. Alih-alih mengekor pada pragmatisme penjajah, mereka mendayagunakan perangkat sosiologis untuk meruntuhkan segregasi rasial dan ketidakadilan distribusi sumber daya di Hindia Belanda (Colombijn & Barwegen, 2009). Paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara, sebagai contoh, tidak ditujukan untuk melatih tukang-tukang terampil, melainkan untuk menanamkan kemerdekaan batin dan budi pekerti agar rakyat bisa berdiri setara dengan bangsa lain (Japar, 2018).

Keterikatan pada SSH ini termanifestasi secara jelas dalam cara bangsa ini menyelesaikan krisis identitas pascakolonialnya. Penolakan tajam terhadap model pembangunan yang meniadakan roh kemanusiaan terefleksi dari integrasi religiusitas dan keadilan sosial ke dalam batang tubuh UUD 1945 (Mahfud MD & Heryansyah, 2025). Mengeliminasi ilmu-ilmu yang mengkaji akar kebudayaan tersebut demi metrik keterserapan pasar berarti melakukan keputusan epistemik secara paksa dari sejarah pembentukan bangsa, mengingat kosakata untuk merawat demokrasi partisipatif hanya bisa disediakan oleh disiplin humaniora (Kusumastuti, 2017). Dengan demikian, sintesis dari seluruh rangkaian premis khusus ini membuktikan bahwa pemeliharaan ilmu SSH bukanlah suatu preferensi sekunder, melainkan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi kesinambungan eksistensi republik.

Kritik Utilitarian dan Tanggapan Etis

Ketika dinamika historis tersebut dikonfrontasikan dengan realitas kontemporer, muncul sanggahan (*objection*) kritis dari kelompok utilitarian dan teknokrat industri. Mereka berdalil bahwa pada era Revolusi Industri 4.0, parameter "kecerdasan" telah bergeser menjadi kemampuan kuantitatif dalam beradaptasi dengan inovasi digital untuk mengungkit Produk Domestik Bruto (PDB). Alokasi anggaran negara ke ranah riset dan pengembangan (R&D) dipandang sebagai satu-satunya jalan rasional bagi negara berkembang untuk bertahan hidup di pusaran rantai nilai global (Annunziata & Bourgeois, 2018). Kasus tingginya angka sarjana pengangguran akan diklaim sebagai akibat langsung dari ketidaksesuaian keahlian (*skills mismatch*), sehingga subsidi terhadap jurusan filsafat, antropologi, atau sastra dianggap sebagai pemborosan massal (Irfani, 2026; Vicky, 2026).

Melalui pengamatan mendalam terhadap dinamika pasar tersebut, sanggahan utilitarian ini nyatanya mengandung cacat penalaran. Pasar tenaga kerja bergerak sangat volatil; merancang kurikulum hanya untuk melayani spesifikasi industri yang sedang tren saat ini sama saja dengan merencanakan keusangan massal (*planned obsolescence*) bagi generasi mendatang. Memisahkan penguasaan instrumen produksi dari pemahaman sosiologis akan melahirkan kelas pekerja unggul yang mengalami atrofi intelektual: mereka cekatan dalam coding, tetapi tidak memiliki kerangka etis untuk menyadari bahwa karya mereka mungkin digunakan untuk algoritma yang memanipulasi pemilu atau mengeksploitasi data privat warga (Çakır & Aydemir, 2022).

Pada akhirnya, kasus-kasus disfungsi etis tersebut mempertegas prinsip universal bahwa pendidikan vokasional yang tercerabut dari akar filosofis cenderung menumpulkan sensitivitas terhadap jurang ketimpangan. Sebaliknya, SSH bekerja sebagai sistem imunologi sosial yang secara aktif melindungi nalar publik dari eksploitasi yang kerap dibungkus dalam selubung modernitas dan pembangunan (Sarsito, 2006). Oleh karena itu, mengadu domba kompetensi teknis dan kedalaman moral merupakan suatu kesalahan fatal; sintesis akhir menunjukkan bahwa keduanya mensyaratkan integrasi mutlak untuk menghindari jebakan peradaban yang kering (Alcorta, 2015).

Mandat Etis-Teleologis UUD 1945

Untuk memahami kedudukan disiplin ilmu dalam kerangka negara, mandat "mencerdaskan kehidupan bangsa" harus dikonseptualisasikan sebagai suatu imperatif etis-teleologis, dan bukan sekadar instruksi administratif untuk mencetak modal manusia (*human capital*). Secara teleologis, tujuan keberadaan entitas politik bernama Indonesia adalah pencapaian kedewasaan intelektual warga negara yang memungkinkan partisipasi berkeadilan dalam peradaban global (Lontoh & Chia, 2022). Secara etis, mandat ini menuntut negara untuk menghormati warga negaranya sebagai subjek otonom yang memiliki martabat transendental, dan bukan sebagai baut penggerak mekanis yang disiapkan semata-mata untuk melayani akumulasi kekayaan segelintir elite (Vicky, 2026). Pengabaian terhadap pilar etis ini akan mereduksi makna "cerdas" menjadi sekadar keandalan operasional yang teralienasi dari tanggung jawab kemanusiaan (Samekto & Natalis, 2024).

Klaim di atas dapat diuji melalui distingsi ontologis antara pelatihan vokasional dan pendidikan intelektual. Jika konstitusi hanya menghendaki ketersediaan tenaga teknis, dokumen dasar negara terjebak dalam fasisme efisiensi yang menegasikan nilai humanisme universal. Sebagaimana diperingatkan oleh Mahfud MD dan Heryansyah (2025), penguatan nilai-nilai fundamental dan integrasi hukum merupakan respons mutlak terhadap ketimpangan sosial dan degradasi moral penguasa. Kemajuan teknologi yang dipompa oleh supremasi STEM tanpa diimbangi wawasan sosiologis justru menciptakan kondisi ideal bagi lahirnya feodalisme gaya baru di era siber, yaitu suatu tatanan yang secara perlahan mengikis kedaulatan individu (Riko, 2024).

Pertahanan Nalar Kritis

Ilmu sosial dan humaniora (SSH) merupakan perangkat emansipatoris primer yang membekali warga negara dengan ketajaman kritis untuk membaca anatomi kekuasaan. Berbagai temuan empiris dan analisis teoretis yang telah diuraikan dalam bab ini secara induktif menunjukkan bahwa upaya pemarginalan disiplin SSH pada hakikatnya merupakan tindakan merobohkan benteng pertahanan intelektual negara. Tanpa adanya instrumen ini, marwah universitas akan terdegradasi

menjadi entitas subordinat yang hanya berfungsi memasok komoditas tenaga kerja bagi kepentingan industri global (Pratama, 2015; Vicky, 2026).

Ketertundukan epistemik ini membiarkan lahirnya ancaman struktur hegemoni baru, yaitu suatu tatanan yang di dalamnya algoritma dan kepemilikan modal didayagunakan sebagai alat kontrol sosial yang mengembalikan posisi rakyat menjadi sekadar *kawula* di era digital (Colombijn & Barwegen, 2009; Riko, 2024). Dampak sistemis dari pemandulan kesadaran reflektif tersebut pada tahap berikutnya membuka akses luas bagi infiltrasi neokolonialisme gaya baru. Oleh karena itu, akumulasi dari seluruh premis partikular tersebut membuktikan bahwa mempertahankan SSH bukanlah sekadar preferensi akademik, melainkan tindakan bela negara yang paling esensial untuk merawat api kemerdekaan yang diamanatkan oleh konstitusi (Samekto & Natalis, 2024).

DEINDUSTRIALISASI DINI DAN MITOS RELEVANSI

Akar Masalah Makroekonomi Nasional

Beralih pada ranah empiris, narasi yang menyudutkan SSH atas membengkaknya angka pengangguran merupakan suatu simplifikasi kausalitas yang keliru. Krisis minimnya serapan tenaga kerja terdidik sejatinya bukanlah imbas dari lonjakan populasi lulusan ilmu murni, melainkan konsekuensi logis dari patologi ekonomi yang disebut deindustrialisasi dini. Kondisi ini merepresentasikan suatu anomali berupa penyusutan kontribusi industri manufaktur terhadap penciptaan lapangan kerja dan Produk Domestik Buruto (PDB) jauh sebelum fondasi ekonomi negara tersebut matang (Çakır & Aydemir, 2022). Alih-alih melakukan lompatan inovasi, perekonomian justru meluncur ke sektor jasa informal yang berproduktivitas rendah.

Akar dari penyusutan sektor manufaktur ini umumnya terkait dengan sindrom *Dutch Disease* (penyakit Belanda) dan kebijakan finansialisasi eksekutif yang mencekik daya saing produk lokal di pasar internasional (Andrade & Duarte, 2017; Bogliaccini, 2013). Secara teoretis, sektor manufaktur merupakan mesin utama penggerak lapangan kerja (*engine of employment generation*) yang mampu menyerap sumber daya terdidik dalam skala besar (Alcorta, 2015). Ketika mesin utama ini macet, tuntutan terhadap institusi perguruan tinggi untuk merombak kurikulum agar "relevan" dengan industri yang sedang sekarat merupakan kebijakan yang salah sasaran.

Kekeliruan kausalitas (*fallacy of false cause*) ini kian nyata ketika melihat fakta di lapangan bahwa angka pengangguran juga mendera ratusan ribu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan vokasi (Irfani, 2026). Bukti ini menegaskan bahwa penyakit struktural berada pada sisi permintaan (stagnasi iklim investasi padat karya), dan bukan pada sisi penawaran dari kampus. Transformasi paksa menuju pendidikan berbasis STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) tanpa dibarengi revitalisasi sektor riil hanya akan memperbanyak antrean pengangguran bersertifikat insinyur (Robi, 2026).

Batas Epistemologis Keilmuan STEM

Berangkat dari kegagalan struktural industri dan ketidaksesuaian keahlian (*skills mismatch*) tersebut, diskursus ini bergerak naik untuk menguji instrumen utamanya, yaitu batas epistemologis keilmuan STEM. Di tataran ontologis, metodologi STEM berpijak kokoh pada rasionalitas instrumental yang mengejar efisiensi kuantitatif (Altuwaijri, Klakattawi, & Alsaggaf, 2025). Meskipun kemutlakan fungsinya tidak diragukan, STEM bersifat nirnilai (*value-free*) dalam dialektika moralitas politik. Ilmu teknik memberikan presisi tentang cara membangun suatu infrastruktur digital, tetapi tidak menyediakan landasan epistemologis untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan infrastruktur tersebut hanya menguntungkan kelas menengah kota dan meminggirkan masyarakat adat (Vicky, 2026). Tanpa kawalan kompas humaniora, rekayasa canggih rentan terdistorsi menjadi instrumen ketidakadilan yang efisien.

Keterbatasan rasionalitas instrumental STEM tersebut berpotensi menjadi bom waktu jangka panjang saat diterapkan dalam lanskap sosial Indonesia. Tanpa kemampuan membaca ketimpangan relasi kuasa, inovasi teknologi akan dengan mudah diakuisisi oleh praktik oligarki. Kode biner dan

algoritma tidak dirancang untuk mendekonstruksi segregasi spasial serta rasisme struktural peninggalan tata kota kolonial (Colombijn & Barwegen, 2009; Pratama, 2015).

Dialektika Lanjutan dan Resolusi Struktural

Penganut paham teknokrasi kerap berargumen bahwa di tengah gempuran otomatisasi, prioritas utama negara adalah mengejar ketertinggalan teknologi material. Mereka meyakini bahwa reorientasi radikal ke arah pendidikan vokasi dan STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) merupakan suatu keniscayaan untuk menghindari jebakan negara berkembang (Sukoco, 2026). Di mata penganut pragmatisme ini, kajian sejarah atau filsafat baru layak dipikirkan ketika pemenuhan kebutuhan material dasar masyarakat telah terpenuhi (Annunziata & Bourgeois, 2018).

Melalui pencermatan terhadap benturan klaim tersebut, pandangan hierarkis tersebut nyatanya memuat dikotomi yang fiktif. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan justru menggarisbawahi bahwa kapabilitas manufaktur dan kohesi sosial harus tumbuh bersamaan (Alcorta, 2015). Disiplin STEM ditugaskan untuk memecahkan kebuntuan efisiensi produksi, sedangkan ilmu SSH ditugaskan untuk memecahkan krisis distribusi dan keadilan agar surplus produksi tidak dikuasai secara eksklusif oleh segelintir elite (Kasiyan, 2019; Riko, 2024). Keduanya beroperasi dalam relasi komplementer, dan bukan kompetitif.

Dengan demikian, akumulasi dari seluruh data pengangguran sektoral dan batasan epistemologis ini membuktikan bahwa pengagungan kompetensi teknis sembari memberangus diskursus sosiologis melahirkan pemapanan struktur subordinasi baru yang menempatkan warga negara semata-mata sebagai subjek konsumen dan pemasok data (Riko, 2024). Merawat SSH bukan berarti antikemajuan, melainkan suatu upaya mutlak untuk mengintegrasikan capaian STEM dengan nilai filosofis Pancasila agar teknologi mengabdikan pada kemanusiaan (Mahfud MD & Heryansyah, 2025).

Mengembalikan Beban Solusi

Krisis daya serap lapangan kerja adalah masalah struktural deindustrialisasi dini yang harus disembuhkan melalui perombakan kebijakan ekonomi politik secara makro (Andrade & Duarte, 2017). Sintesis dari berbagai realitas komplementer tersebut mengarahkan bab ini pada simpulan bahwa wacana penutupan program studi non-industri tidak memiliki pijakan kausalitas yang valid. Merespons kelesuan ekonomi dengan cara memangkas kedalaman akademik perguruan tinggi merupakan suatu bentuk pengambinghitaman (*scapegoating*) terhadap tanggung jawab institusional.

Di dalam proses transisi yang penuh gejolak inilah kehadiran sosiolog, antropolog, dan pakar hukum menjadi sangat krusial untuk mencegah model pembangunan yang tunakemanusiaan (Pratama, 2015; Riko, 2024). Pada akhirnya, penyelesaian masalah ketenagakerjaan secara nasional mutlak membutuhkan komitmen reindustrialisasi padat karya. Mengorbankan disiplin-disiplin tersebut justru akan melapangkan jalan menuju kehancuran karakter bangsa.

SIMPULAN

Fenomena pengangguran sarjana yang kerap dijadikan dalih pembenaran sejatinya merupakan produk dari stagnasi sektor riil dan patologi deindustrialisasi dini, dan bukan akibat kelebihan pasokan lulusan filsafat atau sastra. Menyalahkan ruang akademik atas ketidakmampuan instrumen negara dalam mengelola iklim investasi manufaktur merupakan suatu kesesatan berpikir yang tidak termaafkan secara epistemologis. Merajut seluruh alur dialektika yang telah diurai, artikel ini menegaskan bahwa wacana penutupan program studi SSH demi mengejar mitos “relevansi industri” merupakan suatu kekeliruan diagnosis yang mengancam keutuhan bangsa.

Berangkat dari problem struktural ekonomi tersebut, posisi filosofis tulisan ini berdiri tegas: mempertahankan hak hidup keilmuan SSH merupakan wujud kepatuhan mutlak pada amanat etis-teleologis konstitusi. Tujuan sakral untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” menolak segala bentuk reduksi nilai manusia menjadi sekadar komponen mesin industri. Sektor ilmu sosial dan humaniora memberikan persenjataan analitis yang dibutuhkan publik untuk membongkar hegemoni masa lalu

serta mendeteksi ancaman neokolonialisme yang hari ini bersembunyi di balik jubah kecerdasan buatan dan efisiensi algoritmik.

Sebagai rekomendasi, institusi pendidikan tinggi harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai wilayah otonom bagi pencarian kebenaran (*the pursuit of truth*). Integrasi harmonis antara kehebatan teknis sains dan kedalaman batiniah SSH merupakan satu-satunya skema rasional untuk menciptakan tatanan industrialisasi yang inklusif dan membebaskan. Mengorbankan keutuhan intelektual demi kepuasan pragmatis pasar hanya akan menyeret Republik Indonesia ke dalam lembah feodalisme gaya baru. Pada akhirnya, kemandirian dan kejayaan peradaban suatu bangsa tidak pernah diraih semata-mata dari pabrik-pabrik besinya, melainkan dari kedewasaan watak dan kemerdekaan jiwa warganya.

DAFTAR RUJUKAN

- Alcorta, L. (2015). Industrialization, Employment and the Sustainable Development Agenda. *Development*, 58(4), 528–539. <https://doi.org/10.1057/s41301-016-0057-6>
- Altuwaijri, A. E., Klakattawi, H. S., & Alsaggaf, I. A. (2025). Advancing Saudi Vision 2030 for Sustainable Development: Modeling Influencing Factors on Adolescents' Choice of STEM Careers Using Structural Equation Modeling, with a Comparative Analysis of Bahrain and Singapore. *Sustainability*, 17(7), 2870. <https://doi.org/10.3390/su17072870>
- Andrade, J. S., & Duarte, A. P. (2017). Dutch Disease in Central and Eastern European Countries. Dalam G. C. Pascariu & M. A. P. D. S. Duarte (Ed.), *Core-Periphery Patterns Across the European Union* (hlm. 113–141). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78714-495-820171004>
- Annunziata, M., & Bourgeois, H. (2018). The Future of Work: How G20 Countries Can Leverage Digital-Industrial Innovations into Stronger Highquality Jobs Growth. *Economics*, 12(1), 20180042. <https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2018-42>
- Bogliaccini, J. A. (2013). Trade Liberalization, Deindustrialization, and Inequality: Evidence from Middle-Income Latin American Countries. *Latin American Research Review*, 48(2), 79–105. <https://doi.org/10.1353/lar.2013.0028>
- Çakır, M. S., & Aydemir, R. (2022). A Dutch Disease Approach into the Premature Deindustrialization. *Economic Systems*, 46(4), 101037. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2022.101037>
- Colombijn, F., & Barwegen, M. (2009). Racial Segregation in the (Post) Colonial City: The Case of Indonesia1. *Urban Geography*, 30(8), 838–856. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.30.8.838>
- Irfani, F. (2026, April 29). Polemik di Balik Rencana Hapus Jurusan tak “Relevan” Kepentingan Industri. *BBC News Indonesia*. Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0w04ngrz0o>
- Japar, M. (2018). The Improvement of Indonesia Students ‘Engagement in Civic Education through Case-Based Learning.’ *Journal of Social Studies Education Research*, 9(3), 27–44. (Characteristics Participant). Diambil dari <https://www.jsser.org/index.php/jsser/article/view/278>
- Kasiyan. (2019). Art, Art Education, Creative Industry: Critique of Commodification and Fetishism of Art Aesthetics in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 6(1), 1586065. <https://doi.org/10.1080/23311983.2019.1586065>
- Kusumastuti, K. (2017). The Old Phase of Javanese Villages as an Early Form of Participatory Democratic Governance in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 28(3), 220. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.5>
- Lontoh, F. O. L., & Chia, P. S. (2022). An Evaluation of Christian Education in Indonesia in Light of Targum: A Cognitive Psychology Approach. *Pharos Journal of Theology*, 104(1). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1044>

- Mahfud MD, Moh., & Heryansyah, D. (2025). Constitutional Reinforcement of the Integration of Indonesian and Islamic Values. *Prophetic Law Review*, 169–198. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss2.art2>
- Pratama, R. K. (2015). Power, Language, and Identity: A Foucauldian Analysis of Post-Colonial Language Education Policy in Indonesia. *Acta Paedagogica Vilnensia*, 55, 23–39. <https://doi.org/10.15388/ActPaed.2025.55.2>
- Riko. (2024). When Freedom of Speech and Neofeudalistic Buzzers Collide: A Note for the Politics of Citizenship. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 4(1), 76–95. <https://doi.org/10.33830/humaya.v4i1.9495>
- Robi. (2026, Mei 3). Pengamat Politik Kritik Rencana Penutupan Prodi. *INAnews*. Diambil dari <https://www.inanews.co.id/2026/05/pengamat-politik-kritik-rencana-penutupan-prodi/>
- Samekto, F. X. A., & Natalis, A. (2024). Exploring the Grundnorm Dilemma: Can Pancasila be Considered the Grundnorm in the Context of ‘the Pure Theory of Law’? *Journal of Philosophical Investigations*, 18(48). <https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.62978.3843>
- Sarsito, T. (2006). Javanese Culture as the Source of Legitimacy for Soeharto’s Government. *Asia Europe Journal*, 4(3), 447–461. <https://doi.org/10.1007/s10308-006-0078-y>
- Sukoco, B. M. (2026, April). *Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026*. Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=RP48cwwdcn-I>
- Vicky. (2026, Juli 5). Kampus Bukan Pabrik Rencana Penutupan Prodi, Pendidikan Tinggi Mau Dibawa ke Mana. *Media Indonesia*. Diambil dari https://mediaindonesia.com/video/detail_video/2937-kampus-bukan-pabrik-rencana-penutupan-prodi-pendidikan-tinggi-mau-dibawa-ke-mana